

Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Petani

Fajar Sudarwo

Konsultan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Ayem tentrem ing desane Pak Tani...

Urip tentrem lan tandure...

Ora kurang sandangpangane...saaneke...

Wayah esuk manggul pacul, nggiring sapine katon sehathe.....

(Kus Bersaudara)

Gambaran kehidupan tenram dan makmur petani Indonesia seperti tembang jawa di atas sudah sulit didapat kenyataannya seperti nasib tembang tersebut yang sudah hampir musnah dari pendengaran kita. Pertanyaannya mengapa nasib petani semakin hari semakin terpuruk? Padahal alam dan lingkungan cukup subur? Justru akhir kahir ini bencana dan petaka yang terus menghantui mereka... wabah hama, gagal panen, kekeringan, banjir, harga merosot, sementara biaya hidup (kesehatan, pendidikan, perumahan) melambung tidak sebanding dengan harga produksi pertanian yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan itu biasanya orang lebih bertumpu kepada takdir Allah, atau alam mulai bosan, atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat, atau kebodohan dan kemalasan petani sendiri atau apakah yang bisa membenarkan kenyataan.

Nasib kehidupan petani kenyataannya tidak cuma tergantung dari karakter / kapasitas individu petani, lingkungan alam lokal, dan kebijakan nasional saja tetapi ada hubungannya dengan perkembangan dunia yang telah mengglobal. Kita ingat bahwa nasib petani Indonesia mulai dicampurtangani globalisasi sejak tahun 1757 VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) di Jawa. Sejak itu sebetulnya petani sudah menjadi bagian dunia global yang 60% nasibnya tergantung di tangannya.

Globalisasi secara umum merupakan bentuk keterbukaan dunia yang tidak lagi tersekat oleh wilayah administrasi negara, ideologi, agama, kultur budaya masyarakat dan keterpisahan geografi fisik tempat tinggal. Dunia bisa terbuka karena dipercepat oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Teknologi tersebut dapat menembus batas berbagai sekat-sekat dunia manusia. Di satu sisi globalisasi dapat mempercepat pencerahan dan menyebarnya nilai nilai universal yang dapat dinikmati masyarakat dunia. Namun di sisi lain globalisasi telah mengakibatkan korban jutaan manusia yang nasibnya semakin terpuruk.

Globalisasi sudah berlangsung dan tidak ada satu elemen kekuatan apapun dari manusia yang dapat membendungnya. Karena globalisasi telah menembus batas fisik, pikiran, sifat dan konsepsi hidup manusia dunia. Secara fisik manusia bisa menghindari, namun secara konsepsi hidup yang berupa pikiran, cita cita dan selera kehidupan sulit dihindari.

Karena penyebaran dan penularannya menggunakan proses penyadaran diri manusia mulai lahir sampai di liang kubur.

Positifnya globalisasi bagi manusia dunia adalah berkembangnya nilai nilai universal seperti; keadilan sosial, demokratisasi, pluralisme, hak hak manusia, solidaritas antar warga dunia dll. Disamping itu manusia dunia dapat menikmati berbagai pilihan fasilitas kehidupan mulai dari yang manual sampai mesin. Namun globalisasi telah dipergunakan oleh paham perdagangan dan industri untuk menyerap dan menghisap warga miskin dunia untuk mengumpulkan keuntungan dan kekayaan bagi segelintir warga kaya dunia. Dalam tulisan ini saya akan mempertajam sisi gelap dari globalisasi bagi kehidupan pertanian di Indonesia umumnya dan Jawa khususnya.

Pertanian dianggap menjadi sektor yang paling strategis bagi perdagangan dan industri dunia. Sebab dengan menguasai sektor pertanian dunia berarti bisa menguasai pangan dunia, dengan demikian kalau makan dunia bisa dikuasai maka seluruh elemen manusia dunia dapat direkayasa untuk kepentingan. Kenyataannya penguasa perdagangan dan industri global telah membuka TNC-TNC (*Trans National Corporation*)

agribisnis raksasa di seluruh pelosok dunia. Salah satu ciri agribisnis raksasa adalah mengeluarkan habitat petani dari kultur dan lingkungan alam ke mekanisme produksi dan pasar. Secara radikal ada perubahan cara bertani dunia yang disebut revolusi hijau. Dimana seluruh budi daya dan alat produksi pertanian diganti sebagai berikut. Pertama, Orientasi pertanian tidak untuk kemakmuran petani dan pelestarian lingkungan tetapi untuk meningkatkan produksi pertanian sebesar besarnya. Kedua, hasil pertanian bukan untuk mencukupi kebutuhan petani tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Sehingga harga tidak ditentukan petani tetapi ditentukan oleh pasar dunia. Ketiga, bibit tidak alami namun merupakan hasil rekayasa genetika antar varitas dan antar makhluk hidup yang ada. Keempat, pupuk tidak dari alam tetapi dari bahan kimia. Kelima, pengendalian hama tidak di kontrol dari ekosistem dan predator alami tetapi di berantas dari racun kimia. Keenam, alat produksi tidak dari manusia tetapi dari mesin. Ketujuh, hasil produksi tidak diproduksi menjadi industri makanan rakyat, tetapi menjadi bahan baku industri makanan rekayasa. Sehingga terjadi penguasaan makan dunia oleh TNC yang merugikan petani khususnya dan warga dunia pada umumnya.

Saat ini nasib petani sudah dikontrakan dalam organisasi perdagangan dunia - WTO (*World Trade Organization*) dalam sebuah kontrak yang dinamai AOA (*Agreement on Agricultural*) yang ditandatangani pada 1 Januari 1995. Inti dari kontrak tersebut adalah memasukan

sektor pertanian menjadi komoditi perdagangan bebas dunia. Dimana seluruh petani di dunia harus mengikuti cara dan mekanisme kerja perdagangan bebas. Persoalannya petani miskin selalu dirugikan dengan perusahaan pertanian baik di negara miskin maupun di negara kaya. Sebab salah satu kebijakan utama dalam perjanjian tersebut adalah mengurangi subsidi petani namun meningkatkan subsidi perusahaan pertanian. Berhubung negara Indonesia lebih banyak petani miskinnya ketimbang perusahaan pertanian, maka dampak AOA di Indonesia sungguh memprihatinkan. Hal ini seperti yang ditemukan dalam studi dampak AOA yang dilakukan PAN-Indonesia bekerja sama dengan APRN dan INFID pada tahun 2001. Dampak AOA menurut studi tersebut adalah: Pertama; sebelum ada AOA Indonesia sebagai negara eksportir beras ke-9 di dunia, namun tiga tahun setelah kontrak tahun 1998 Indonesia justru sebagai negara pembeli beras nomor satu di dunia. Kedua; pemerintah yang diarahkan IMF atas anjuran WTO - AOA mengurangi subsidi atas input-input pertanian seperti pupuk, benih dan obat. Sementara harga dikontrol sehingga biaya produksi melambung tidak sebanding dengan hasil jual produksi. Ketiga; tidak adanya subsidi ekspor, sehingga produksi pertanian Indonesia kalah bersaing di pasar internasional. Keempat; menurunnya ketahanan pangan Indonesia. Kebutuhan beras rata-rata 30 juta ton pertahun, sementara beras yang ada di pasar dunia paling banyak hanya 20 juta ton. Dengan begitu akan sangat mencelakakan kalau kebutuhan beras Indonesia mengandalkan pada pasar luar. Kelima; berkurangnya peran *State Trading Enterprise* untuk menyelamatkan stok makan nasional dan harga produksi dari petani. Dimana IMF mendesak untuk mengurangi atau membubarkan BULOG. Keenam; seluruh fasilitas TNC yang ada di Indonesia menurut perjanjian BOP kalau terjadi kerusakan akibat

protes dari masyarakat menjadi tanggungan negara Indonesia. Ketujuh; Perjanjian paten dan TRIPs memberikan pembenaran bagi perusahaan perusahaan asing di Indonesia untuk mematenkan segala macam kekayaan hayati dan produk pangan lokal. Seperti Shiseido telah mematenkan kemukus, lempuyang, kayu legi, pelantas, pulowaras, cabe jawa, brotowali. Demikian juga tempe telah dipatenkan milik perusahaan dari Merika dan Jepang.

Petani yang paling rentan ketika terjadi krisis ekonomi adalah petani pinggir hutan. Sehingga ketika terjadi krisis ekonomi maka jumlah kerusakan hutan meningkat secara dratis. Menurut *Guinness World Record* menyebutkan ada 1,871 juta hektar hutan di Indonesia rusak antara tahun 2000 - 2005 atau 51 kilometer perhari hutan rusak di Indonesia. Menurut Perum Perhutani pada tahun 2006 jumlah penduduk Indonesia yang ada di kawasan Hutan sebanyak 88.709.522 orang, dimana 32.803.274 orang berada di Pulau Jawa atau hampir 40% dari total penduduk Indonesia yang berada di kawasan hutan. Dengan demikian kalau petani pinggir hutan di Jawa belum berdaya, kalau terjadi krisis ekonomi yang melanda petani, maka potensi terjadinya perusakan hutan yang terbesar adalah di Pulau Jawa.

Upaya pemberdayaan petani di kawasan hutan sudah dilakukan oleh Perum Perhutani dengan membentuk Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH). Rata-rata Perum Perhutani Kabupaten mempunyai 68 LMDH dengan anggota 10.385 orang dari 48 desa di 7 kecamatan yang menggarap lahan 42.000 ha. Namun berbagai hasil evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja LMDH belum mampu menyelesaikan persoalan petani pinggir hutan. Kosentrasi LMDH baru pada pengelompokan petani dalam pengolahan lahan luhatn untuk budidaya tanaman sela. Sedangkan hal hal yang menyangkut substansi peningkatan pendapatan

dan peningkatan kualitas kehidupan petani belum kelihatan hasilnya. Bahkan beberapa pengurus LMDH sudah ada yang disinyalir hanya sebagai penyalur atau agen pupuk, obat dan benih yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemberdayaan petani dan pelestarian hutan.

Tantangan Utama Pemberdayaan Petani

Tantangan utama program pemberdayaan masyarakat tani Indonesia secara substansial sama dengan tantangan nasional dan pemerintahan Otonomi Daerah, yaitu dalam hal mengatasi dan mengentaskan kemiskinan. Era reformasi dan Pemerintahan Otonomi Daerah yang sudah berlangsung sekitar sepuluh tahun, mengalami "jatuh bangun" dalam mengatasi dan mengentaskan kemiskinan warga tani di wilayahnya. Ibaratnya bagaikan orang menimba air dari lautan yang tidak pernah terkuras walaupun sudah ditimba setiap hari dengan berbagai peralatan. Ada beberapa hasil penelitian (termasuk angka dari BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tidak mengalami penguangan bahkan ada fluktuasi yang membengkak khususnya pada saat warga terkena krisis sosial ekonomi atau terkena musibah bencana alam.

Penanganan dan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan warga tani, sudah dan sedang terus dilakukan oleh semua Pemerintah Kabupaten / kota bersama berbagai LSM dan Lembaga Swasta termasuk. Pola penanganannya sudah komprehensif dan integratif dari berbagai strategi sesuai dengan pemahaman dan kajiannya yang bersumber kepada berbagai analisis, seperti:

Pertama, pemahaman bahwa sumber kemiskinan adalah "nasib". Solusi yang dilakukan adalah memberi semacam bantuan (*caritatip*) cuma cuma tanpa syarat apapun (syaratnya hanya "miskin"). Program ini terlihat pada Bantuan Langsung Tunai dan Subsidi beras murah yang sering dikenal dengan RASKIN. Masih banyak program pemerintah semacam ini mulai dari asuransi kesehatan, beasiswa dan lain sebagainya. *Kedua*, pemahaman bahwa sumber kemiskinan adalah "lemahnya sumber daya manusia" dan keterbatasannya sarana dan prasarana. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan program program pembangunan baik fisik maupun non fisik. *Ketiga*, pemahaman bahwa sumber kemiskinan adalah adanya sistem atau struktur sosial ekonomi yang meminggirkan warga kecil untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Solusi yang dilakukan adalah mereformasi dan melakukan restrukturisasi berbagai sistem yang dapat memberi akses dan kesempatan warga miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. *Keempat*, pemahaman bahwa sumber kemiskinan adalah tidak/kurang berdayanya manusia menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan program program pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, pemahaman bahwa sumber kemiskinan adalah adanya penafsiran nilai dan budaya yang menghambat percepatan warga untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan revitalisasi nilai budaya dalam perspektif reintepre-

tating yang lebih mendukung warga miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Lima pemahaman dan strategi di atas memang sudah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota bersama *stakeholdernya*. Secara manajerial dan kualitas penanganannya untuk program program diatas memang masih dalam proses penyempurnaan. Hal ini mengingat para aparatus pemerintahan maupun warga masyarakat masih pada masa transisi perubahan dari kebiasaan melakukan kerja kerja pelayanan dan pembangunan menjadi kerja kerja yang bersifat "fasilitasi" dan pemberdayaan. Oleh karena itu sangat penting adanya berbagai masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan strategi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program program pemberdayaan masyarakat.

Hasil kajian *Institut for Researh and Empowerment* selama lebih dari lima tahun di beberapa desa baik di Pulau Jawa maupun Luar Jawa memperoleh *lesson learned* bahwa ada perubahan karakter dan pemahaman "miskin" bagi warga masyarakat. Perubahan yang substansial sedang terjadi adalah; *Pertama*; Ada pergeseran pemahaman stereotip tentang "miskin" bagi warga masyarakat. Label miskin yang dilekatkan kepada warga bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap "aib" atau hal yang perlu disembunyikan. Namun label miskin justru dianggap perlu dimiliki warga sebagai identitas yang dapat menjadi persyaratan sosial administrasi untuk mendapat hak menerima bantuan. Perubahan ini mempunyai pengaruh terhadap berbagai program pengen-

atasan kemiskinan. ⁵Kedua; fakta kemiskinan ada pergeseran dari konsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan primer menjadi konsentrasi pada pemenuhan kebutuhan sekunder. Pengertian pemahaman kebutuhan primer pada paper ini adalah kebutuhan yang berhubungan untuk mempertahankan hidup secara fisik (makan, sandang, papan). Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berhubungan untuk pemenuhan berbagai keinginan sesuai dengan wacana yang dimiliki. ⁶Ketiga; ada perubahan sumber asupan kebutuhan dasar dari asupan alam ke asupan "rekayasa". Warga desa sebagian besar beralih dari perilaku ketergantungan terhadap asupan alam (kelangkaan beras diganti dengan ubi, jagung dll) menjadi ketergantungan terhadap asupan berbagai rekayasa (kelangkaan beras diganti dengan indomi). Implikasinya terhadap berbagai perubahan berbagai persoalan kesehatan warga. ⁷Keempat, ada perubahan fakta dari ketidak tercukupinya kehidupan pada tingkat lokal menjadi fakta dari ketertinggalan terhadap berbagai perubahan gaya

5 Banyak kasus warga yang meminta didaftar sebagai warga miskin untuk memperoleh BLT, Raskin, Askeskin dll.

6 Banyak warga penerima BLT, Raskin yang secara administratif memiliki label miskin namun menggunakan HP, TV bahkan sepeda motor, dan istrinya menggunakan peralatan perias wajah dll

7 Warga jarang sekali yang mau memasak sendiri dengan nasi ubi, nasi jagung namun lebih suka memasak indo me.

Kesesatan Para Pendamping Petani

Akibat 32 tahun lebih Pemerintah Indonesia menggelontorkan program pembangunan (sebagian besar bangunan fisik dan materi) kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat terlanjur menikmati pola relasi dimana warga menerima "bantuan" materi atau bangunan fisik tanpa syarat apapun, syaratnya adalah hanya "label" miskin atau "membutuhkan" atau dimengerti sebagai hak yang harus diterima dari pemerintah. Dampaknya bagi masyarakat adalah hilangnya kekuatan dan potensi diri warga yang pelan pelan hilang ditelan "rezim pembangunan". Tradisi gotong royong dicerai dengan proyek padat karya, tradisi swadana dilukai program subsidi, tradisi swadaya dirusak oleh program bantuan sehingga hampir menghilangkan karakter swasembada yang ada pada diri warga masyarakat. Kemudian dampak bagi pamong desa adalah hilangnya tradisi sebagai pamong dan penggerak warga, berganti sebagai "penyampai" atau pengelola bantuan (kenikmatan dan keuntungan peran sebagai penyampai bantuan cukup besar, baik secara sosial maupun material untuk dirinya). Adapun

kehidupan global. Kelima, ada perubahan perilaku manajemen keluarga dari diversifikasi sumberdaya yang ada berubah menjadi ketergantungan terhadap industri imitasi. Artinya ada perubahan perilaku dari reproduksi di dalam rumah menjadi perilaku konsumtif terhadap berbagai barang industri produk instan dan imitasi yang kualitasnya jauh dari standar baku kesehatan manusia.

dampak bagi Organisasi Masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah hilangnya tradisi semangat felantropi dan mendampingi warga, berganti sebagai pembuatan proposal ke *funding* dan *pendamping project*. Akhirnya secara umum dampak bagi bangsa Indonesia adalah hilangnya keberdayaan warga dalam menghadapi krisis tahun 1998 yang implikasinya rakyat menumbangkan "rezim pembangunan" dan mendorong munculnya era reformasi dan otonomi daerah.

Mandat utama reformasi kepada pemerintah adalah mengganti "*developing approach*" menjadi *Empowerment approach*. Mandat tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai Undang-undang dan Peraturan pemerintah, dimana salah satunya adalah UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Kabupaten diberi mandat untuk melakukan perubahan fungsi dalam mengelola pemerintahan daerah yaitu dari fungsi lama (Orde Baru) yaitu; (1) Fungsi Pengaturan (2) Fungsi Pelayanan, (3) Fungsi Pembangunan, berubah menjadi tiga fungsi di masa Otonomi

mi Daerah⁵ yaitu (1) Fungsi Pengaturan (2) Fungsi Fasilitas (3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan perubahan fungsi pemerintahan tersebut sangat penting, karena fungsi pemerintahan yang dijalankan Orde Baru ternyata telah menghasilkan karakter bangsa seperti diatas yaitu karakter hedonis, konsumeris, manja, penuh ketergantungan, berkeinginan banyak namun bukan pekerja keras, kurang tekun, kurang disiplin dan cepat mengeluh lelah.

Namun pada realitanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menghadapi resistensi perilaku warga yang bermental "banyak keinginan dan harapan mempunyai kekayaan namun tidak sebanding dengan daya kreasi, inovasi, ketekunan dan kemauan kerja keras yang dimiliki". Apalagi bagi Pemerintah daerah yang ketempatan perusahaan tambang, maka program pemberdayaan dapat mengalami berbagai tantangan. Sebab sebagian warga yang berada diwilayah lahan tambang khususnya penghasil minyak, banyak menaruh harapan akan mendapat "bagian" harta "karun" yang dianggap milik nenek moyangnya. Berbagai angan-angan telah menggelayut dalam benak mereka; rumah mereka akan diperbaiki, perkampungan akan berubah bagaikan perkotaan kecil yang penuh segala fasilitas umum, kebutuhan dasar keluarga akan tercukupi tanpa bekerja keras, anak cucu mereka akan

bekerja pada perusahaan minyak dengan gaji besar dan fasilitas mewah. Kalau tidak terwujud angan-angan tersebut, warga sudah mempunyai "senjata" andalannya, yaitu; marah, protes, boikot dan mengganggu atau mengusir para perusahaan minyak yang ada di wilayahnya dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dianggap telah menjual harta warisan nenek moyangnya kepada pihak lain.

Kesulitan tersebut akan bertambah bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat, apabila pola relasi perusahaan tambang dengan masyarakat lebih suka mengambil jalan pintas. Dimana perusahaan lebih suka menggelontorkan bantuan fisik dan materi kepada warga masyarakat disekitarnya, yang semata mata hanya menginginkan warga tidak mengganggu proses kerjanya. Sementara *Civil society organization* yang ada lebih trampil dalam peran sebagai pendamping project yang tidak mengacu kepada kebijakan Pemerintah kabupaten beserta peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Fakta yang terjadi pada beberapa Pemerintah kabupaten dan kota, telah memacu secara *all-out* mendorong aparatus pemerintah daerah untuk menerapkan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh pejabat pemerintah kabupaten, kecamatan sampai desa sudah dimotivasi melalui berbagai metode. Namun secara teknis, penerapan kebijakan yang menggunakan *empowerment approach* tidak mudah dilaksanakan, seperti pada hampir seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa oknum aparat birokrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecamatan sampai desa telah merasa "nikmat" dan terbiasa menggunakan *caritatip and developing approach*. Sementara warga masyarakat yang berkarakter seperti yang telah disebutkan diatas, mengalami keterkejutan ketika *empowerment and social entrepreneurship character building*

diterapkan. Penerapan *empowerment approach* kalau analogi-kan adalah seperti contoh orang berdoa kepada Tuhan. Yaitu; ketika manusia berdoa meminta kekuatan, Tuhan tidak memberi tulang besi otot kawat daging baja, namun Tuhan justru memberi beban yang bisa menumbuhkan kekuatan hambanya. Ketika manusia berdoa meminta kesejahteraan, Tuhan tidak langsung memberi harta benda namun memberi kesehatan diri agar manusia bisa berusaha dan bekerja keras agar mendapat hasil yang dapat digunakan untuk mensejahterakan hidupnya. Ketika manusia berdoa meminta kecerdasan, Tuhan tidak memberi rumus-rumus namun justru memberi berbagai kesulitan sebagai media untuk menumbuhkan kecerdasan umatnya. Kalau saja Kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti analogi tersebut akan mengagetkan warganya. Karena warga sudah terbiasa dengan cara pemberian bantuan langsung. Sebagai contoh ketika warga minta disejahterakan, kebiasaannya pemerintah memberi SEMBAKO, BLT, bantuan lantai rumah, beasiswa pendidikan anak, obat gratis dll. Tetapi ketika Pemerintah Kabupaten tidak memberi bantuan langsung namun memberi akses permodalan, pasar, kesempatan belajar untuk bekerja dan berusaha agar mereka dapat mensejahterakan dirinya. Maka warga masyarakat akan kaget, tidak puas, dan tidak merasa dibantu. Seperti yang dilakukan beberapa Pemerintah Kabupaten dan kota saat ini yaitu; program subsidi bunga bank sebagai media membuka akses permodalan bagi warga masyarakat yang akan berusaha. Ternyata beberapa masyarakat kaget bahkan ada yang protes dengan berbagai dalih, karena kebiasaannya warga masyarakat memperoleh bantuan hibah atau subsidi.

Maka dari itu ada beberapa kasus Bupati yang menggunakan *empowerment approach* kehilangan popularitasnya dan bahkan dijauhi oleh berbagai elemen yang semula

⁵ Sesuai dengan salah satu model pemerintahan di era *New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep "reinventing government"

sebagai pendukung utamanya. Sehingga beberapa Bupati melepaskan pendekatan tersebut demi menjaga kelangsungan popularitasnya dan status quonya. *Empowerment approach* memang bagaikan "jamu pahit" yang tidak enak rasanya namun sesungguhnya menyehatkan, tidak seperti pemanis yang enak rasanya namun membawa penyakit. Namun ada beberapa Kabupaten dan kota yang telah mempunyai pemimpin yang visioner dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga tetap teguh menggunakan *empowerment approach* walaupun harus kehilangan popularitasnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa Bupati dan Walikota berlatar belakang motivator pemberdayaan masyarakat dan berlatar belakang pembentuk watak manusia disiplin dan pekerja keras.

Memang *empowerment approach* terkadang tidak terlalu memuaskan warga masyarakat yang sudah terbiasa dengan pendekatan bantuan langsung. Bahkan kemungkinan akan tidak disukai oleh para perangkat desa, karena mereka sudah terbiasa hanya sebagai penyalur bantuan. Sedangkan penerapan program pemberdayaan masyarakat secara teknis bisa dianggap "membebani" perangkat desa. Oleh karena itu diperlukan kekompakan dan ketegasan bersama bagi semua elemen yang bergerak dan berelasi dengan masyarakat. Tanpa ada kekompakan dan sinergisitas antara Pemerintah daerah, *Civil Society Organization* dan Perusahaan, maka pendekatan tersebut akan lambat keberhasilannya bahkan akan terancam gagal sama sekali. Oleh karena itu, perlu ada

langkah langkah kongkrit adanya kekompakan dan kerja sama antara Perusahaan, Pemerintah kabupaten dan *civil society Organization* dalam berelasi dengan masyarakat. Kekompakan itu berfokus pada perilaku yang saling mendukung untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat termasuk menghadapi segala tantangan dan hambatan.

Indikasi bahwa warga tani Indonesia dibiarkan terlantar akibat kesesatan para pendampingnya adalah: (1) mudahnya petani melepaskan lahan pertaniannya untuk digunakan untuk industri dan perumahan. Hampir semua daerah mengalami pengurangan lahan pertanian dari tahun ke tahun; (2) banyak anak warga tani yang didorong oleh keluarganya untuk keluar dari sektor pertanian masuk di sektor buruh industri dan jasa di perkotaan. (3) kebanggaan menjadi petani semakin menurun bahkan ada satu desa perkampungan "pengemis", yang mempunyai persepsi bahwa hidup sebagai pengemis di jalanan hidupnya lebih nikmat dari pada seorang petani.

Para pendamping petani baik secara langsung maupun tidak langsung secara administratif dan normatif di Indonesia cukup banyak. Sosok mereka bisa disebut satu persatu mulai dari pamong desa, Tenaga Penyuluh pertanian, Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, dan berbagai tenaga lapangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun fungsi dan keberadaan mereka di lapangan disinyalir banyak menyesatkan diri ke wilayah pendampingan project atau program dari pada mendampingi warga tani. Pamong desa di wilayah pertanian semakin tersesat menjadi adminstratur pemerintah desa, penyalur program pemerintah dan penarik pajak dari pada sebagai pamongnya warga tani. Tenaga Penyuluh Pertanian lebih asyik dan serius mendampingi tanaman pada demplotnya dari pada menjadi pendamping petani. Para

fasilitator/konsultan PNPB Mandiri Perdesaan lebih banyak mendampingi administrasi project dan teknik project dari pada mendampingi warga untuk membangkitkan keberdayaannya. Tenaga lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang memposisikan dirinya sebagai pengawal dan pendamping project organisasinya dari pada mendampingi warganya.

Sesatnya para pendamping petani, bukan semata mata hanya persoalan normatif namun namun lebih berhubungan dengan persoalan substansi pemberdayaan. Minimal ada lima kesulitan pendampingan pemberdayaan warga. Pertama, kesulitan mengikuti dinamika kebutuhan dasar petani. Kebutuhan dasar keluarga tani terus terlindas oleh keinginan keinginan sekunder akibat bombardir iklan TV dan Radio yang mengkonstruksi keinginan warga tani di perdesaan untuk menjadi konsumen aktif dari barang barang buatan insdustri. Kedua, kesulitan membangun kesadaran dan berfikir kritis warga tani terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Kesadaran kritis warga menjadi hal yang sangat sulit dibangkitkan ketika pendidikan dan informasi yang berkembang lebih banyak bernuanasa "pragmatis penebar pesona". Warga tani khususnya dan warga Indonesia pada umumnya lebih banyak "terpukau" terhadap hal hal baru dan hal hal yang "menyenangkan" dirinya, dari pada mengembangkan kesadaran kritis di dalam dirinya. Ketiga, kesulitan membangkitkan partisipasi untuk berorganisasi. Organisasi semakin langkad di Indonesiaketika kedisiplinan dan keteguhan menjaga komitmen bersama tidak ada. Sejak Rezim Orde Baru sampai era reformasi, organisasi yang berkembang hanya pada tataran administratif dan artifisial sebagai media elit warga untuk menaikan posisi kehidupannya dan sebagai media untuk prasyarat mendapat berbagai program program bantuan baik dari organisasi pemerintah

maupun organisasi non pemerintah. Keempat, kesulitan mendampingi warga untuk mengakses berbagai pusat-pusat sumber daya. Hal ini karena adanya proses peminggiran secara struktural dan sosiologis bagi petani terhadap pusat-pusat sumberdaya. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah adanya berbagai pola 'pemaklaran / broker' dalam membangun akses kepada pusat-pusat sumber daya. Kelima, kesulitan memfasilitasi warga dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak petani melalui kontrol sosial dan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan warga tani. Kendala utama dalam hal ini adalah karena tidak adanya organisasi warga tani yang menjadi basis organisasi politik yang berakses langsung terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia.

Penyesatan pendampingan petani tidak hanya pada aras substansial, namun juga pada tataran strategi pendampingan. Strategi pendampingan pemberdayaan tidak populis bahkan kurang membuat

hati senang yang didampingi. Berbeda dengan pendampingan program pembangunan dan program bantuan yang banyak "membuat hati senang" yang menerimanya. Strategi pendampingan pemberdayaan kurang mendapat antusias warga tani, karena dalam strategi pendampingan lebih banyak memfasilitasi proses yang membangkitkan disiplin diri, kerja keras, ketahanan menghadapi kesulitan dan kerja kreatif.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Tani

Pada era globalisasi ekonomi, persoalan kemiskinan menjadi semakin kompleks dan meluas. Pengaruh resesi negara lain atau benua lain bisa berimbas terhadap munculnya kemiskinan di masyarakat tertentu. Lebih-lebih Negara Indonesia saat ini semakin ramah terhadap investor asing dan masuknya TNC. Niscaya pada masa yang akan datang perilaku ekonomi global akan masuk dan mempengaruhi perilaku ekonomi dan kehidupan lokal. Oleh karena itu dalam pengentasan kemiskinan diperlukan strategi sistemik yang berkesinambungan dan mampu menggerakkan seluruh elemen yang ada.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten dan kota menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi leading sektor penggerakannya. Langkah strategis Badan tersebut adalah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Perumusan Positioning dan Kapasitas.

Badan pemberdayaan masyarakat pemerintah Kabupaten dan kota perlu membuat kurikulum dasar sebagai kerangka acuan semua SKPD, Kecamatan dan Desa dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan substansial yang dilakukan untuk pembuatan kurikulum

tersebut adalah: *Pertama*, diperlukan kajian praktis untuk penelusuran jaringan ekonomi warga tani di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Sebab perilaku ekonomi pada era globalisasi memungkinkan terjadinya relasi yang saling terkait antar elemen faktor produksi dan pemasaran pada semua level. *Kedua*, diperlukan analisis positioning dalam konteks kewilayahan dan komoditas pertanian yang menjadi sumber perekonomian warga. Positioning ini penting untuk memahami, mengidentifikasi berbagai daya dukung dan ancaman atau persaingan, *Ketiga*, diperlukan pengkajian dan proses penemuan potensi-potensi unggulan yang dapat menjadi topangan ekonomi warga tani miskin. Hal ini penting untuk mengolah potensi unggulan tersebut menjadi daya dukung utama ekonomi keluarga warga miskin. *Keempat*, diperlukan penemuan *trade mark* atau *brand image* untuk identitas sosial ekonomi daerah. Hal ini penting sebagai social marketing dan sekaligus sebagai acuan *character building* warganya.

Ketika empat hal di atas telah dilakukan maka diperlukan kajian tentang kapasitas dan kemampuan warga hubungannya dengan empat hal kelayakan teknis dan manajerialnya. Kapasitas dan kemampuan aparat pemerintah dan warga sangat penting diketahui untuk merumuskan

kurikulum pemberdayaan masyarakat sebagai acuan pelaksanaan fungsi pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola fungsi fungsi fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Raperda Pengentasan Warga Tani Tertinggal

Peraturan daerah kabupaten Bojonegoro untuk pengentasan warga tertinggal, sangat penting untuk melindungi dan menjamin struktur dan sistem ekonomi lokal hubungannya dengan nasional, regional dan global memberi kesempatan warga miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sesuai dengan persoalan menghadapi fenomena kemiskinan seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka perlu melakukan redefinisi tentang kemiskinan secara substansial. Fokus yang menjadi pusat perhatian peraturan daerah adalah perubahan konsentrasi dan energi warga tertinggal dari pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pemenuhan kebutuhan sekunder, perubahan perilaku proses divesifikasi menjadi gaya instan dan pemanjaan diri. Perubahan tersebut mengakibatkan percepatan keinginan pemenuhan kebutuhan sekunder dan pemanjaan diri jauh lebih cepat dari pada peningkatan hasil, sehingga terjadi devisa yang berkelanjutan (besar pasak dari pada tiang). Kemiskinan yang seperti itu, sering disebut kemiskinan "semu", atau kemiskinan artificial. ⁵Sifat kemiskinan semu

⁵ Tumbuh dan berkembangnya kemiskinan semu adalah bukan semata mata kesalahan warga, namun merupakan akibat negatif dari perilaku politik "tebar pesona", yang menghasilkan berbagai produk kebijakan "bantuan" instant, yaitu; warga mendapat materi (BLT, Raskin) tanpa harus adap imbalan

tidak mudah diselesaikan atau diberdayakan, bahkan kemiskinan semu akan menjadi komoditas terjadinya "project kemiskinan", politik menjual kemiskinan dll. Strategi menghadapi fenomena kemiskinan semu seperti di atas diperlukan pemahaman yang radikal terhadap kemiskinan. Pemahaman itu adalah 'MISKIN ATAU KAYA ADALAH PILIHAN HIDUP. Cara pandang terhadap kemiskinan seperti itu, memposisikan dan menaruh tanggung jawab pemerintah lebih kepada fungsi pengaturan, fasilitasi dan memberdayakan dari pada fungsi "memaksakan diri" untuk menargetkan semua warga menjadi "orang kaya". Pengaturan yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota berfokus pada: *Pertama*, ada pengaturan yang menjamin terjadinya kemudahan warga memperoleh makanan murah dan sehat, *Kedua*, ada pengaturan yang menjamin terjadinya kemudahan warga memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, murah, berkualitas. *Ketiga*, ada pengaturan yang menjamin terjadinya kemudahan warga memperoleh pelayanan pendidikan (formal dan non formal) yang murah dan berkualitas. *Keempat*, ada pengaturan yang menjamin terjadinya kemudahan warga untuk mengakses ke alat produksi, permodalan dan pemasaran. *Kelima*, ada pengaturan yang menjamin terjadinya keamanan baik secara fisik maupun sosial bagi para pelaku ekonomi. *Keenam*, ada pengaturan yang menjamin adanya pelayanan perizinan dan administrasi usaha/kerja yang cepat, mudah, murah, tidak berbelit belit dan bebas dari pungutan ilegal.

Peraturan daerah Pemerintah Kabupaten dan kota menjamin dan berasumsi "jika warga sudah cukup makan, sehat, berpendidikan, ada kemudahan mengakses sarana usaha/bekerja yang dijamin keamanannya, maka warga bisa memilih untuk menjadi orang miskin (kurang terpenuhi-

jasa atau produksi, namun cukup menunjukan atau modal identitas bahwa dirinya adalah miskin.

nya kebutuhan sekunder) atau menjadi orang kaya (kecukupan dan berlimpahnya untuk pemenuhan kebutuhan sekundernya)".

Strategi dan pola dasar program pendampingan

Strategi yang perlu digunakan untuk mencapai pemberdayaan petani adalah membuka pos kerja di lokasi program untuk menempatkan sejumlah tenaga pendamping petani. Posisi pendamping adalah sebagai *technical asisstant* untuk budidaya pertanian unggulan dalam wilayah tersebut, penggerakan partisipasi pemeliharaan hutan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan / organisasi petani agar mampu mengelola lumbung tani yang dapat menjadi *supporting* petani dalam permodalan, peningkatan kapasitas produksi, manajemen keuangan rumah tangga dan pemasaran hasil produksi.

Metode pendampingan petani untuk membangkitkan keberdayaan dalam meningkatkan kualitas kehidupannya adalah menggunakan *character building approach*. Dimana petani akan dibangkitkan karakter atau penjiwaannya sebagai petani unggul yang melestarikan hutan dikawasannya. Hal ini penting untuk mengurangi perilaku instan yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Perilaku instan tersebut sudah mengakibatkan perilaku yang merusak hutan atau menjual lahan pertaniannya.

Pola dasar yang akan dikembangkan adalah pola lumbung tani yang menggunakan manajemen *social entrepreneurship* dengan sistem *revolving fund* dan *micro finance*. Dimana tidak ada unsur pemberian hibah bagi petani. Petani akan mendapat "pinjaman" benih unggul ketika musim tanam, kemudian pada musim panen mereka mengembalikan dalam bentuk uang dengan perhitungan harga pokok bibit plus bunga (sebagai pengimbang inflansi). Kemudian uang tersebut oleh manajemen lumbung tani akan digunakan untuk pengadaan bibit unggul yang akan

diberikan petani lainnya yang memerlukan bibit. Manajemen lumbung tani yang dikelola oleh lembaga/organisasi petani yang sudah ada yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan) binaan Perhutani. Manajemen lumbung tani juga akan memberi pelayanan tentang permodalan produksi, peningkatan kapasitas produksi, manajemen keuangan rumah tangga dan pemasaran hasil produksi. Seluruh pelayanan jasa tersebut akan dikelola secara *entrepreneurship* untuk menambah kapasitas dan membiayai operasional pelayanan. Sehingga setelah program pendampingan tersebut berakhir program masih berlangsung.

Proses transformasi budidaya jagung unggul akan dimulai dari:

Pertama; seleksi LMDH dari seluruh LMDH di wilayah cakupan program pendampingan yang layak dan bersemangat mengikuti program ini untuk direkrut menjadi peserta program. Setiap LMDH (setiap LMDH mempunyai anggota rata-rata 70 petani sampai 300 petani) akan mendapat pelatihan *character building* dan budidaya jagung program ini. Maka dari itu untuk melatih satu LMDH akan ada dua sampai enam kali angkatan pelatihan. Metode pelatihannya menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa secara partisipatif dengan proporsi 30% teori dan 70% praktek. Selama proses pelatihan, akan ada seleksi kepada peserta yang dianggap mampu dan serius sebagai relawan yang akan melakukan uji coba budidaya selama dua kali masa tanam/panen.

Kedua; Petani yang melakukan uji coba budidaya

tanaman unggulan program ini sebaiknya didampingi fasilitator pemberdayaan petani dibantu pengurus LMDH (untuk dua kali masa tanam/panen). Petani yang melakukan uji coba tersebut akan mendapat pinjaman bibit, namun biaya produksi seperti pupuk, obat, tenaga kerja ditanggung sendiri. Hal ini penting untuk menjaga *achievement motivation* petani dalam melakukan uji coba budidaya bibit unggul dari program ini. Sebab kalau petani yang melakukan ujicoba budidaya bibit unggul mendapat bantuan bibit, pupuk, obat, tenaga kerja, akan berdampak: (a) Mengurangi semangat dan keseriusan mereka karena kalau gagal resiko kerugiannya sedikit. (b) Munculnya "pengusaha" tani yang mengklaim menguasai lahan hutan namun dia hanya sebagai "bos" dengan modal dari program ini dan mempekerjakan kawan kawannya sebagai buruhnya.

Ketiga; Hasil ujicoba budidaya tanaman unggulan yang dilakukan oleh para pengurus kelompok tani akan dievaluasi. Proses evaluasi akan melibatkan anggota kelompok tani. Sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung tingkat keberhasilan dan keuntungan hasil uji coba tersebut. Para petani yang terlibat dalam evaluasi ini akan memberi sosialisasi kepada petani lain yang tidak bisa terlibat dalam kegiatan evaluasi.

Keempat; Petani yang akan ikut membudidayakan tanaman unggulan ini (setelah melihat keberhasilan para ketua kelompoknya) akan diseleksi sebagai peserta program. Petani yang lolos seleksi akan dibimbing oleh para pengurus kelompok yang didampingi fasilitator pemberdayaan petani untuk melakukan budidaya tanaman unggulan program ini selama dua kali masa tanam. Mereka akan mendapat pinjaman bibit, namun biaya produksi seperti pupuk, obat, tenaga kerja ditanggung sendiri. Pada musim panen mereka mengembalikan kepada lumbung tani yang dikelola LMDH seperti yang telah disebutkan di atas.

Kelima; LMDH akan mendapat pelatihan dan bimbingan tentang *manajemen micro finance*, manajemen ekonomi rumah tangga petani dan sistem penjagaan dan pelestarian hutan. Sehingga mereka mampu mengelola lumbung tani yang dapat berfungsi seperti disebut di atas. Selanjutnya LMDH akan mendapat pendampingan fasilitator pemberdayaan petani untuk mengelola lumbung tani selama empat kali masa panen.

Keenam; LMDH akan mendapat pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil produksi dan pemasarannya. Sehingga LMDH mampu membantu pemasaran produksi tanaman unggulan dan pengolahan produksi seperti produksi makanan dll. Para petani akan mendapat pinjaman modal dan pendampingan manajemen selama dua kali musim tanam/panen. Pinjaman tersebut dikembalikan kepada program ini yang akan digulirkan kepada LMDH lainnya akan dapat bantuan program ini. Sebagian institusi yang memberlangsungkan program pemberdayaan petani hutan diperlukan nfasilitasi LMDH untuk mampu: (a) memberi pelayanan penyediaan bibit dan bimbingan teknis budidaya tanam unggulan kepada petani, (b) memberi pelayanan bimbingan teknis diversifikasi olahan hasil tanam unggulan. (c) mampu mengelola lumbung tani dengan bentuk *micro finance* agar dapat menampung dan memasarkan produksi.